

## **BAB II**

### **PROFIL BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA**

#### **2.1 Sejarah Balai Benih Padi dan Palawija**

Kawasan yang kini adalah lahan pertanian UPTD Balai Benih Padi dan Palawija pada zaman jauh sebelum kedatangan Bangsa Hindia Belanda merupakan daerah rawa dengan kondisi tanah tergenang air sehingga menjadi sarang nyamuk. Kemudian pada tahun 1919 yang merupakan awal berdirinya Balai Benih Padi dan Palawija ini Bangsa Hindia Belanda melakukan penelitian oleh para ahli ilmu tanah, dan hasil survei dapat disimpulkan bahwa dataran tersebut termasuk jenis tanah grumusol yang cocok untuk tanaman padi sawah. Untuk merubah rawa rawa menjadi pertanian yang produktif, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah bendungan di mata air Cisuru, dari bendungan tersebut dibuat irigasi yang mengalirkan air ke wilayah sekitar. Sehingga dengan adanya saluran irigasi tersebut lahan yang berupa rawa rawa berubah menjadi lahan pertanian.

Selanjutnya, UPTD Balai Benih Padi dan Palawija sejak tahun 1919-1942 dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda atau Provinciale Lanbouw Voorlichtings Diensten (LVD) dengan nama Zaad Hoeve. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda ini dilakukannya pembuatan saluran irigasi dan drainase serta bangunan pertanian hingga akhirnya dapat dilakukan kegiatan sektor pertanian, khususnya pertanian padi. Dengan kebijakannya yaitu Pemerintah Belanda mengontrak lahan tanah milik masyarakat dan mengharuskan petani membayar pajak sewa lahan kepada Pemerintah Belanda.

Fungsi dari lembaga LVD adalah memberikan pembinaan terhadap para

petani pribumi untuk meningkatkan produksi. Kelembagaan LVD terdiri dari dua bagian yaitu :

1. Bagian Tanaman Rakyat (Indlandsche Landbouw) yang bidang pengelolaannya meliputi Tanaman Padi, Palawija, Sayur Sayuran, dan Buah Buah.
2. Bagian Tanaman Keras, yang bidang pengelolaannya meliputi tanaman tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kapok, kina, dan teh.<sup>19</sup>

Setelah terjadi perang dunia II pada tahun 1942 maka lahan pertanian yang awalnya dikelola oleh Belanda digantikan oleh Bangsa Jepang yang pembinaan pertanian dilaksanakan oleh Norinka. Kebijakan program tidak berbeda pada jaman Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan bahan pangan, lalu ditambah dengan program untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang.<sup>20</sup>

Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1945 pengelolaan diserahkan kepada Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Dengan programnya yaitu meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Lalu Balai Benih Padi dan Palawija ini mengalami beberapa perubahan nama, 1.) Diambil alih oleh Pemerintahan RI dan dikelola oleh Jawatan Pertanian RI dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PPC) pada tahun 1945-1970, 2.) Berdasarkan SK Gubernur No. 98 Tahun 1970 berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea (Perjan) pada tahun 1970-1986, 3.) Berdasarkan SK Gubernur 061-1/ORTAK/1986 berganti nama menjadi Balai

---

<sup>19</sup> Muhamad Rizky Rahmansyah dkk, *Sistem Informasi Buku Tamu Berbasis Web Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat* (Unikom: 2017), hal.11.

<sup>20</sup> Arsip Balai Benih Padi dan Palawija.

Benih Tani Makmur Cihea (BBTMC). Pada tahun 1986-2002, 4.) Berdasarkan SK Gubernur No. 53 Tahun 2002 dan Perda No. 5 Tahun 2002 berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Benih Padi Cihea (UPTD BPBP Cihea). Pada tahun 2002-2017, 5.) Berdasarkan SK Gubernur No. 82 Tahun 2017 berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Padi dan Palawija (UPTD BBPP). Pada tahun 2017-sekarang.

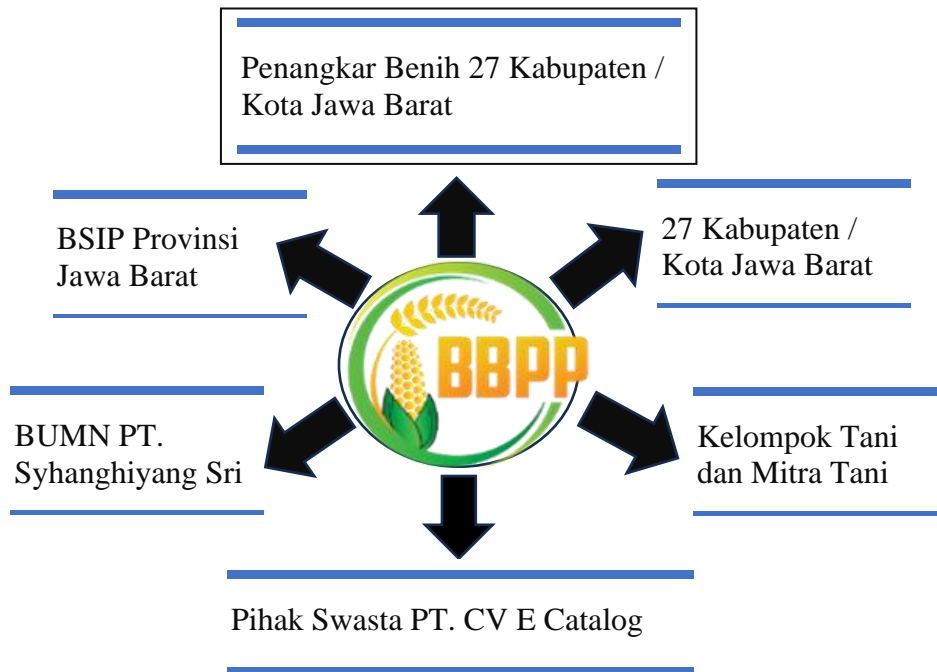
## **2.2 Profil Balai Benih Padi dan Palawija**

### **2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Benih Padi dan Palawija**

Berdasarkan judul penelitian dengan nama instansi yaitu Balai Benih Padi dan Palawija yang ditetapkan pada tahun 2017, maka diambil tugas pokok dan fungsi pada Pergub Jawa Barat Nomor 82 tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang tanaman pangan, meliputi benih padi dan palawija.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
  1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan Benih Padi dan Palawija.
  2. Penyelenggaraan pengelolaan Benih Padi dan Palawija meliputi Benih Padi dan Palawija.
  3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Balai Benih Padi dan Palawija.
  4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 2.2.2 Penyaluran Benih Padi dan Palawija

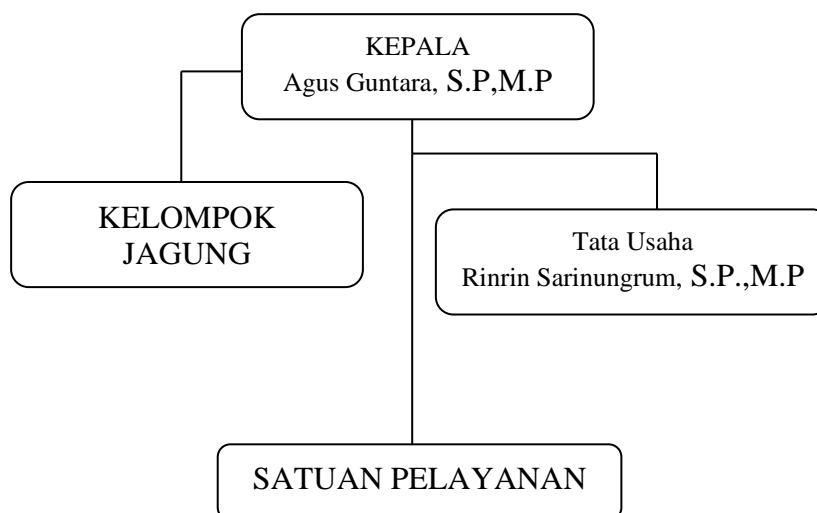


**Gambar 2.1 Penyaluran Benih Padi dan Palawija.<sup>21</sup>**

Penyaluran benih adalah hasil dari produksi benih yang dihasilkan oleh Balai Benih Padi dan Palawija lalu disalurkan atau dijual ke beberapa pihak yang terdapat pada gambar di atas. Harga penjualan benih sesuai atau sudah diatur pada perda (peraturan daerah). Dalam penyalurannya ini akan menghasilkan pendapatan guna untuk memenuhi PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang undangan.

<sup>21</sup> Profil Balai Benih Padi dan Palawija pada Power Point oleh pihak Balai Tahun 2017.

### 2.2.3 Struktur Organisasi



### 2.2.4 Sumber Daya Manusia

Berikut ketenagakerjaan Balai Benih Padi dan Palawija berdasarkan status kepegawaian ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Non ASN (Bukan Aparatur Sipil Negara).

**Tabel 2.1 Data kepegawaian berdasarkan ASN dan Non ASN.<sup>22</sup>**

No	Jabatan	ASN	Non ASN
1.	Kepala	1	-
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-
3.	Pengawas Benih Tanaman	2	-
4.	Analisis Benih	2	-
5.	Pengelola Lahan Pertanian	11	5
6.	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	2	-
7.	Teknisi Instalasi Budaya	6	-
8.	Operator Mesin	7	-
9.	Pengelola Keuangan	1	-
10.	Pengelola Data	1	-
11.	Pengadministrasi Umum	1	-
12.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	-
13.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	-

<sup>22</sup> Data Kepegawaian Balai Benih Padi dan Palawija.

14.	Pengelola Data Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan	-	1
15.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	1
16.	Front Office	-	1
17.	Tenaga Keamanan	-	13
18.	Tenaga Kebersihan	-	13
19.	Pengemudi	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>39</b>	<b>36</b>

### 2.2.5 Satuan Pelayanan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija Provinsi Jawa Barat

Satuan pelayanan atau lahan perbanyakan benih merupakan unit atau cabang yang tersebar di wilayah kota/kabupaten Jawa Barat guna kepentingan perbanyakan benih.

**Tabel 2.2 Satuan pelayanan atau Lahan Perbanyakan Balai Benih Padi dan Palawija.<sup>23</sup>**

No	Satuan Pelayanan	Luas (Ha)
1.	BBPP Bojongpicung Cianjur	130,0497
2.	BBPP Doktormangku Cianjur	94,2386
3.	BBPP Cibeber Cianjur	6,3000
4.	BBPP Cikarang Bekasi	6,5400
5.	BBPP Kawalu Tasikmalaya	5,5000
6.	BBPP Plumbon Cirebon	18,6400
7.	BBPP Karangpawitan Garut	6,0000
8.	BBPP Campakan Purwakarta	7,7000
9.	BBPP Panawangan Ciamis	3,9000
10.	BBPP Cikebo Majalengka	4,9800
<b>Jumlah</b>		<b>283,8483</b>

<sup>23</sup> Profil Balai Benih Padi dan Palawija oleh Pihak Balai Tahun 2017.

### **2.2.6 Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan**

1. Visi Balai Benih Padi dan Palawija yaitu mewujudkan penangkar benih padi dan palawija Jawa Barat juara, dinamis dan Sejahtera.
2. Misi Balai Benih Padi dan Palawija yaitu :
  1. Mengembangkan dan memasyarakatkan benih padi dan palawija yang bermutu dan bersertifikat.
  2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perbanyakan dan distribusi benih padi di Jawa Barat.
  3. Menyediakan benih unggul bersertifikat di Jawa Barat.
  4. Menumbuh kembangkan kemitraan pengembangan benih padi di Jawa Barat.
  5. Meningkatkan kemandirian petani penangkar benih padi dan palawija di Jawa Barat.
3. Moto Balai Benih Padi dan Palawija yaitu ‘ Mutu Andalanku, Kepuasan Jaminanku ‘.
4. Maklumat Pelayanan Balai Benih Padi dan Palawija yaitu ‘ Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan penyediaan benih padi dan palawija sesuai standar oprasional pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ‘.<sup>24</sup>

### **2.2.7 Tujuan dan Sasaran Balai Benih Padi dan Palawija**

Tujuan atau hasil yang ingin dicapai Balai Benih Padi dan Palawija yaitu :

1. Mengembangkan benih padi dan palawija unggul bersertifikat melalui

---

<sup>24</sup> Profil Balai Benih Padi dan Palawija dibuat resmi oleh Pihak Balai Tahun 2017.

pola kemitraan antara balai benih padi dengan penangkar di Jawa Barat.

2. Meningkatkan ketersediaan benih unggul bersertifikat dalam mendukung peningkatan produksi padi dan palawija di Jawa Barat.
3. Meningkatkan pelayanan dan distribusi penyediaan benih padi secara berjenjang di Jawa Barat.
4. Mengembangkan perbenihan padi dan palawija di kelompok tani penangkar Jawa Barat.

Sasaran atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan oleh Balai Benih Padi dan Palawija yaitu :

1. Berkembangnya penangkaran benih dan palawija yang unggul bersertifikat di Jawa Barat.
2. Tersedianya benih unggul bersertifikat bagi penangkar dan petani di Jawa Barat.
3. Tersedianya benih unggul bersertifikat dalam mendukung peningkatan produksi padi dan palawija di Jawa Barat.
4. Terbentuknya kelompok tani penangkar benih padi mandiri di Jawa Barat.<sup>25</sup>

Berdasarkan pembahasan di bab 2 ini berkaitan atau berhubungan dengan teori pembangunan pertanian yaitu terletak pada pemanfaatan lahan basah atau rawa sebagai pembangunan pertanian dan tujuan dari pembangunan pertanian. Sebagaimana yang tertera pada teori di kalimat pemanfaatan lahan basah di Indonesia memiliki peranan penting dan strategis bagi pembangunan pertanian

---

<sup>25</sup> Profil Balai Benih Padi dan Palawija dibuat resmi oleh Pihak Balai Tahun 2017.



terutama mendukung ketahanan pangan Nasional.<sup>26</sup> Pernyataan tersebut sesuai atau berkaitan dengan yang terjadi di Balai Benih Padi dan Palawija yang pada sejarah pembangunannya memanfaatkan lahan basah atau rawa sebagai sektor pertanian.

Selain itu, keterkaitannya pada teori pembangunan pertanian terletak pada adanya andil atau peran dari Pemerintah guna mewujudkan pembangunan pertanian. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kalimat, setiap upaya dalam usaha untuk mewujudkan pembangunan pertanian diperlukan andil besar dari Pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong pembangunan pertanian sehingga dapat dirasakan oleh seluruh pihak dalam usaha pertanian.<sup>27</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur dari awal pembangunan sampai dengan saat ini memiliki adanya andil atau peran dari Pemerintah. Dengan demikian, andil Pemerintah merupakan faktor utama dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan karena Pemerintah memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan guna sebagai pendorong dari pembangunan pertanian.

---

<sup>26</sup> Wandansari, N & Pramita, Y, 2019.

<sup>27</sup> Todaro, 2000.